

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN KUALITAS  
SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KINERJA  
PEMERINTAH DAERAH PADA SELURUH PROVINSI  
DI INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2020 – 2022**

**Skripsi**  
**Untuk memenuhi sebagian persyaratan**  
**Mencapai derajat Sarjana S-1**

**Program Studi Akuntansi**



**Disusun Oleh:**  
*Hardiana Dzuriyatul Mufidah*  
NIM. 31402300136

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**  
**FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI**  
**SEMARANG**  
**2024**

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN KUALITAS  
SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KINERJA  
PEMERINTAH DAERAH PADA SELURUH PROVINSI  
DI INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2020 – 2022**

**Skripsi  
Untuk memenuhi sebagian persyaratan  
Mencapai derajat Sarjana S-1**

**Program Studi Akuntansi**



**Disusun Oleh:**  
*Hardiana Dzuriyatul Mufidah*  
NIM. 31402300136

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
SEMARANG  
2024**

# SKRIPSI

## PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH PADA SELURUH PROVINSI DI INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2020 – 2022

Disusun Oleh :

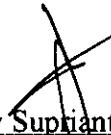
*Hardiana Dzuriyatul Mufidah*

Nim : 31402300136

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya  
dapat diajukan dihadapan sidang panitia ujian Skripsi  
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 29 November 2024

Pembimbing,



Prof. Dr. Edy Suptianto, SE., M.Si., Akt.

NIK. 211406018

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN KUALITAS  
SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KINERJA  
PEMERINTAH DAERAH PADA SELURUH PROVINSI  
DI INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2020 – 2022**

Disusun Oleh :  
*Hardiana Dzuriyatul Mufidah*  
Nim: 31402300136

Telah dipertahankan di depan penguji  
Pada tanggal 29 November 2024

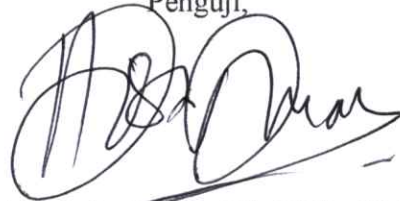
**Susunan Dewan Penguji**

Penguji,



Provita Wijayanti, SE., M.Si, Ak, CA., AWP, IFP, PhD  
NIK. 211403012

Penguji,



Dr. Dista Amalia Arifah, SE, M.Si., Akt., CA.  
NIK. 211406020

Pembimbing



Prof. Dr. Edy Suprianto, SE., M.Si., Akt.  
NIK. 211406018

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk mendapat  
Gelar Sarjana Akuntansi Tanggal 29 November 2024



Ketua Program Studi Akuntansi

Provita Wijayanti, SE., M.Si, Ak, CA., AWP, IFP, PhD  
NIK. 211403012

## HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hardiaan Dzuriyatul Mufidah  
NIM : 31402300136  
Program Studi : S-1 Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi UNISSULA

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi saya dengan judul:

**“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Seluruh Provinsi di Indonesia Tahun Anggaran 2020 – 2022”.**

Merupakan hasil karya sendiri (bersifat original), bukan merupakan tiruan atau duplikasi dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar. Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia untuk dicabut gelar yang telah saya peroleh.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Semarang, 29 November 2024

Yang Menyatakan,



Hardiana Dzuriyatul Mufidah  
NIM. 31402300136

# **PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH PADA SELURUH PROVINSI DI INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2020 – 2022**

**Oleh:**  
**Hardiana Dzuriyatul Mufidah**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah dan kualitas sumber daya manusia terhadap kinerja pemerintah daerah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling yang berdasarkan kriteria. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah provinsi di Indonesia sedangkan sampel yang digunakan adalah 34 pemerintah provinsi di Indonesia. Data yang digunakan adalah predikat SAKIP sebagai kinerja pemerintah daerah, realisasi pendapatan asli daerah dan indeks pembangunan manusia sebagai kualitas sumber daya manusia dengan tahun anggaran 2020 – 2022. Teknik analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis regresi logistik ordinal dengan bantuan *software* SPSS 27. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan kualitas sumber daya manusia secara parsial berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Kata Kunci: PAD, derajat desentralisasi, kualitas SDM, IPM, kinerja pemerintah daerah

## **ABSTRACT**

*The aim of the study to examine the effect of local revenue and human resources quality on performance of local regions. The research was quantitative. Moreover, the data collection technique used purposive sampling was based on criteria given. The population in this study were all of provincial government in Indonesia while the sample were 34 provincial government in Indonesia. The data used in this study were government performance accountability system predicate, realization report of local revenue, and human development index as human resource quality for the 2020 – 2022. In addition, the data analysis technique used ordinal logistic regression with SPSS (Statistical Package for Social Science) 27. The research results show that local revenue and human resources quality have a significant positive effect on the performance of local regions.*

**Keywords:** *local revenue, human development index, human resources quality, local government performance,*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik yang berjudul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Seluruh Provinsi di Indonesia Tahun Anggaran 2020 – 2022”**.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi skripsi dalam rangka menyelesaikan studi Strata Satu untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sudah sepatutnya dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan hamba-Nya dalam segala urusan.
2. Inspektur Kota Semarang yang telah memberikan izin kepada kami untuk melanjutkan Pendidikan Sarjana di Universitas Islam Sultan Agung.
3. Bapak Prof. Dr. Heru Sulistyono, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.
4. Ibu Provita Wijayanti, SE., M.Si., Ak., CA., IFP., AWP. selaku Ketua Program Studi S-1 Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung.
5. Bapak Dr. Edy Suprianto, SE., Akt., M.Si., sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia memberikan waktu serta bimbingan dalam menyelesaikan ini.

6. Ibu Dr. Dista Amalia Arifah, SE, M.Si., Akt., CA. dan Ibu Provita Wijayanti, SE, M.Si., Akt., CA. selaku Dosen Penguji Skripsi yang telah bersedia memberikan masukan dan waktu untuk menguji saya.
7. Seluruh Dosen, Staff dan Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan banyak ilmunya, sehingga penulis mendapat pengetahuan yang dapat digunakan dimasa yang akan datang.
8. Bapak Kadar Usman dan Ibu Erni Isnawati selaku orangtua saya serta keluarga besar yang telah memberikan doa serta dukungan terbaik dalam bentuk materi dan moral kepada saya dalam penyusunan skripsi ini.
9. Teman-teman STA'18 Inspektorat Kota Semarang "Ngeten" yang senantiasa bersama menemani saya dalam suka maupun duka menjalankan kuliah bersama serta mendukung dalam mengerjakan ini.
10. Terima kasih untuk teman-teman S-1 Akuntansi RPL 2023 yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwasanya masih ada keterbatasan dan kekurangan yang dimiliki dalam penyusunan skripsi ini, sehingga menimbulkan ketidak sempurnaan dalam Skripsi ini. Penulis menantikan kritik, saran juga pesan dari pembaca. Besar harapan penulisn bahwa hasil Skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi para pembaca.

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb.***

Semarang, 29 November 2024  
Penulis,



Hardiana Dzuriyatul Mufidah  
NIM. 31402300136

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian .....	6
1.4. Manfaat Penelitian .....	7
BAB II TELAAH PUSTAKA .....	8
2.1. <i>Stewardship Theory</i> .....	8
2.2. Variabel-variabel.....	9
2.2.1. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah .....	9
2.2.2. Pendapatan Asli Daerah .....	13
2.2.3. Kualitas Sumber Daya Manusia .....	14
2.3. Penelitian Terdahulu .....	16
2.4. Kerangka Pemikiran Teoritis.....	18
2.5. Pengembangan Hipotesis .....	23

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>
<b>3.1. Jenis Penelitian.....</b>	<b>26</b>
<b>3.2. Populasi dan Sampel .....</b>	<b>26</b>
<b>3.3. Definisi Operasional Variabel .....</b>	<b>26</b>
<b>3.3.1. Variabel Terikat (Kinerja Pemerintah Daerah).....</b>	<b>26</b>
<b>3.3.2. Variabel Bebas (Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Kualitas                 Sumber Daya Manusia (SDM)).....</b>	<b>27</b>
<b>3.4. Metode Pengumpulan Data.....</b>	<b>28</b>
<b>3.5. Alat Analisis.....</b>	<b>29</b>
<b>3.5.1. Analisis Statistik Deskriptif.....</b>	<b>29</b>
<b>3.5.2. Regresi Logistik .....</b>	<b>30</b>
<b>3.5.3. Regresi Logistik Ordinal .....</b>	<b>31</b>
<b>3.5.4. Uji Multikolinearitas .....</b>	<b>32</b>
<b>3.5.5. Uji Kesesuaian Model (<i>Godness of Fit</i>) .....</b>	<b>33</b>
<b>3.5.6. Uji Keberartian Model (Uji-G) .....</b>	<b>34</b>
<b>3.5.7. Uji Parsial (Uji <i>Wald</i>).....</b>	<b>34</b>
<b>3.5.8. Uji Koefisien Determinasi.....</b>	<b>35</b>
<b>BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>36</b>
<b>4.1. Penyajian Data .....</b>	<b>36</b>
<b>4.2. Analisis Statistik Deskriptif .....</b>	<b>36</b>
<b>4.3. Analisis Data.....</b>	<b>39</b>
<b>4.3.1. Pengujian Parameter Model Regresi .....</b>	<b>39</b>
<b>4.3.1.1. Uji Multikolinieritas .....</b>	<b>39</b>
<b>4.3.1.2. Uji Kesesuaian Model (<i>Goodness of Fit</i>).....</b>	<b>40</b>

4.3.1.3. Uji Keberartian Model (Uji-G) .....	41
4.3.2. Uji Regresi Logistik Ordinal .....	42
4.3.3. Uji Parsial (Uji Wald) .....	43
4.3.4. Koefisien Determinasi Model .....	44
4.3.5. Hasil Pengujian Hipotesis.....	45
4.3.5.1. Hasil Uji Hipotesis 1. Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja pemerintah daerah.....	45
4.3.5.2. Hasil Uji Hipotesis 2. Pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap kinerja pemerintah daerah .....	45
4.4. Pembahasan.....	46
4.4.1. Hubungan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Seluruh Pemerintah Provinsi di Indonesia .....	46
4.4.2. Hubungan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Seluruh Pemerintah Provinsi di Indonesia.....	47
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>49</b>
5.1. Kesimpulan.....	49
5.2. Saran.....	49
5.3. Keterbatasan Penelitian .....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>51</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>54</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 4.1 Hasil Analisis Deskriptif .....</b>	<b>36</b>
<b>Tabel 4.2 Hasil Uji Multikolinearitas .....</b>	<b>39</b>
<b>Tabel 4.3 Uji Kesesuaian Model .....</b>	<b>40</b>
<b>Tabel 4.4 Hasil Uji-G.....</b>	<b>41</b>
<b>Tabel 4.5 Hasil Uji Regresi Logistik Ordinal .....</b>	<b>42</b>
<b>Tabel 4.6 Hasil Uji Wald .....</b>	<b>43</b>
<b>Tabel 4.7 Hasil Uji Koefisien Determinasi .....</b>	<b>44</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) seluruh Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2020 .....	3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel, dan selaras berdasarkan undang-undang. Pemerintah daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kadek & Indrawati (2019) menyatakan bahwa pemerintah daerah diberikan kebebasan untuk mengelola sumber daya sesuai dengan potensi, prioritas, dan kepentingan masing-masing daerah. Sistem otonomi memberi keleluasaan mengelola sendiri urusan pemerintahnya, sehingga setiap instansi pemerintah daerah harus bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menerapkan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan berdasarkan peraturan pada setiap program/kegiatan yang diselenggarakan (Muharsyah, 2020).

Dari pertanggungjawaban tersebut maka muncul tuntutan terhadap akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah. Bentuk akuntabilitas tersebut dituangkan dalam laporan kinerja yang disebut dengan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP) menjelaskan bahwa SAKIP merupakan serangkaian sistematis dan komprehensif dari berbagai aktivitas yang dirancang untuk penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja instansi pemerintah. Muharsyah (2020) menyatakan bahwa SAKIP berfungsi sebagai alat untuk mengukur kinerja instansi pemerintah dari program/kegiatan yang dijalankan sesuai dengan target dan tujuan yang telah ditetapkan.

SAKIP merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan diperlukan beberapa input berupa ketersediaan anggaran untuk membiayai urusan pemerintahan dan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai pelaksana urusan pemerintahan. Dua hal tersebut harus berjalan beriringan supaya tercipta kinerja pemerintah daerah yang baik.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan harus dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan masing-masing daerah. Karena salah satu proses penganggaran adalah menyusun rincian pendapatan. Dimana pendapatan asli daerah merupakan sumber daya yang akan dialokasikan untuk membiayai pengeluaran daerah untuk melaksanakan program/kegiatan tahun berikutnya.

Seperti halnya dalam menyusun APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), pemerintah harus mempertimbangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan tersebut akan dialokasikan untuk membiayai

berbagai program/kegiatan pemerintah, seperti pelayanan publik, pendidikan, serta pembangunan infrastruktur.

Alokasi anggaran yang besar seharusnya menghasilkan keluaran (output) yang berkualitas, hal tersebut akan menunjukkan kinerja pemerintah yang baik. Dasmal et al. (2020) menyatakan bahwa kinerja pemerintah daerah dapat dicapai apabila pemerintah daerah tersebut mampu mengelola potensi daerah secara optimal yang digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Pendapatan asli daerah yang dimiliki setiap daerah berbeda-beda. Dapat kita lihat perbedaan pendapatan di setiap provinsi di Indonesia sangat bervariasi, seperti yang tertera pada tabel berikut:

Gambar 1.1 Grafik Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) seluruh Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2020



Sumber: <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>

Dari hasil tabel di atas, bahwa pendapatan di setiap pemerintah provinsi berbeda-beda sesuai potensi yang dimiliki masing-masing. Yang menarik dari data yang diamati oleh penulis, pada tahun 2020 Provinsi

Daerah Instimewa Yogyakarta (DIY) memiliki PAD yang lebih sedikit dibandingkan dengan provinsi lain yang berada di Pulau Jawa. Apabila dibandingkan dengan nilai SAKIP, Provinsi DIY menjadi satu-satunya provinsi yang mendapat predikat SAKIP “A” (memuaskan), sedangkan Provinsi DKI Jakarta dengan PAD yang paling besar mendapat predikat SAKIP “BB” (sangat baik). Hal tersebut menunjukkan bahwa Provinsi DIY dengan pendapatan asli daerah yang tidak terlalu besar mampu menghasilkan kinerja yang sangat baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas anggaran pada Provinsi DIY dapat menghasilkan kinerja yang efisien dan efektif.

Selain dari kualitas anggaran, pelaksanaan urusan pemerintah daerah tidak akan berhasil apabila tidak diimbangi dengan kualitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki. Sumber Daya Manusia merupakan aset strategis organisasi yang memiliki potensi besar untuk menciptakan nilai tambah atau kinerja suatu organisasi (Azizah, 2020). Sumber daya manusia salah satu elemen krusial dalam organisasi, dengan kualitas sumber daya manusia yang baik maka dapat memberikan kontribusi dalam upaya mencapai tujuan organisasi.

Beberapa riset yang melakukan penelitian pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kinerja pemerintah daerah. Dasmal et al., (2020) menyatakan bahwa kekayaan daerah/Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Riau. Penelitian tersebut sejalan dengan Verawaty et al., (2020) dan Putri & Kunci (2023) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh

positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Akan tetapi Wahyuningsih (2016) menyatakan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Sedangkan untuk riset yang melakukan penelitian kualitas sumber daya manusia terhadap kinerja pemerintah daerah. Azizah (2020) menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara kualitas sumber daya manusia dengan kinerja instansi pemerintah. Namun hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian dilaksanakan oleh Anandah & Aufa (2023) yang menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah, dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Budiani & Asyik (2021) yang menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh negatif terhadap kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan informasi yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan studi mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap kinerja pemerintah daerah yang diukur dengan indikator SAKIP. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini akan berfokus pada pemerintah daerah pada seluruh provinsi di Indonesia dengan pembaharuan indikator kualitas sumber daya manusia diukur menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan indikator kinerja pemerintah daerah yang diukur menggunakan nilai SAKIP. Penelitian terdahulu kinerja pemerintah daerah diukur menggunakan rasio-rasio kinerja keuangan seperti rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio kemandirian. Tetapi rasio-rasio keuangan belum

dapat menunjukkan kinerja instansi pemerintah yang kompleks oleh sebab itu penelitian ini masih menarik untuk dikaji kembali.

Oleh karena itu, penulis memilih judul penelitian yang berbunyi:  
**"Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Seluruh Provinsi di Indonesia pada Tahun Anggaran 2020-2022"**.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan masalah di atas, ditetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Seluruh Provinsi di Indonesia tahun 2020 – 2022?
2. Apakah Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Seluruh Provinsi di Indonesia tahun 2020 – 2022?
3. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Seluruh Provinsi di Indonesia tahun 2020 – 2022?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan di atas yaitu:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Seluruh Provinsi di Indonesia tahun 2020 – 2022.

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada pada Seluruh Provinsi di Indonesia tahun 2020 – 2022.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada pada Seluruh Provinsi di Indonesia tahun 2020 – 2022.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Dari penjelasan tujuan penelitian yang telah ditetapkan di atas, dapat diperoleh manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada pemerintah daerah otonom untuk menentukan keputusan atau kebijakan terkait Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja di masing-masing provinsi di Indonesia.
2. Untuk penelitian selanjutnya, dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan dapat digunakan sebagai perbandingan untuk membahas permasalahan terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

## BAB II

### TELAAH PUSTAKA

#### 2.1. *Stewardship Theory*

Teori Stewardship menjelaskan bahwa manajer sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan *stakeholder* dengan kemampuan yang dimilikinya. Dalam teori ini, diasumsikan bahwa dalam meningkatkan nilai perusahaan, manajer akan bertindak sebaik mungkin serta manajer memiliki kewajiban moral dan etis dalam mengelola perusahaan. Manajer mempunyai motivasi untuk bertindak demi kepentingan *stakeholder* sehingga akan meningkatkan reputasi dan memberikan imbalan dalam jangka panjang.

Dalam mencapai tujuan bersama, manajer akan menyeimbangkan kewajiban mereka kepada *stakeholder* baik di dalam maupun di luar organisasi dengan selalu menjunjung komitmen terhadap norma sosial dan norma moral universal (Hernandez, 2008). Dalam teori yang disampaikan (Donaldson & Preston, 1995) dalam (Hernandez, 2008) bahwa akan terjalin kepercayaan antara *steward* dengan *principal*, karena *steward* melibatkan komitmen para pelaku organisasi untuk mengutamakan kesejahteraan semua pemangku kepentingan. Dalam hubungan interpersonal, manajer akan menunjukkan perilaku mendukung secara rasional yang membentuk kepercayaan interpersonal antara manajer dengan *stakeholder*.

Teori ini dikaitkan dengan mekanisme pertanggung jawaban agar organisasi mampu mencapai tujuannya. Apabila diterapkan dalam dunia pemerintahan, pemerintah sebagai *steward* dan masyarakat bertindak

sebagai *principal*. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berupa fasilitas pelayanan yang memadai sehingga pemerintah harus mampu mengelola dan mengamankan aset negara maupun daerah.

## **2.2. Variabel-variabel**

### **2.2.1. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

#### **a. Pengertian Kinerja Pemerintah Daerah**

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa kinerja merupakan hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 mengenai Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa pengukuran kinerja bertindak sebagai landasan untuk menilai berhasil atau tidaknya pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan dalam upaya mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis, berdasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan, termasuk indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak.

Salah satu cara untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam menyelenggarakan daerah adalah dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau yang disebut dengan

SAKIP. SAKIP dapat mengukur seberapa efektif dan efisien pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

SAKIP merupakan alat yang digunakan pemerintah untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan memberikan manfaat dan dampak langsung kepada masyarakat (Muharsyah, 2020). Dengan adanya SAKIP, pemerintah bertekad mewujudkan pemerintah yang lebih responsif dan akuntabel sehingga akan menciptakan *good governance* dan sistem manajemen yang baik.

Setiap tahun, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) melaksanakan evaluasi SAKIP baik di level Kementerian/Lembaga maupun di level Pemerintah Daerah. selanjutnya, dari hasil evaluasi tersebut akan muncul nilai dan predikat di setiap masing-masing instansi pemerintah. Berikut merupakan predikat dan standar nilai SAKIP yang diberikan Kemenpan RB.

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa kategori predikat nilai AKIP adalah sebagai berikut:

No	Predikat	Nilai Absolut	Interprestasi
1.	AA	>90 – 100	<p><b>Sangat Memuaskan</b>            Telah terjadi <i>Good Governance</i>. Kinerja seluruh unit kerja yang sangat baik menunjukkan komitmen untuk terus meningkatkan pelayanan publik. Pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien ini akan mampu menghadapi tantangan masa depan dengan lebih baik. Sistem pengukuran kinerja yang terintegrasi akan memastikan bahwa setiap individu terus berkontribusi dalam mencapai tujuan organisasi.</p>
2.	A	>80 – 90	<p><b>Memuaskan</b>            Adanya mekanisme pengukuran kinerja hingga ke tingkat eselon 4/ Pengawas/Subkoordinator yang mengindikasikan bahwa instansi pemerintah tengah berupaya secara sistematis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.</p>

No	Predikat	Nilai Absolut	Interprestasi
3.	BB	>70 – 80	<p><b>Sangat Baik</b></p> <p>Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.</p>
4.	B	>60 – 70	<p><b>Baik</b></p> <p>Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.</p>
5.	CC	>50 – 60	<p><b>Cukup (Memadai)</b></p> <p>Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.</p>
6.	C	>30 – 50	<p><b>Kurang</b></p> <p>Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.</p>

No	Predikat	Nilai Absolut	Interprestasi
7.	D	>0 – 30	<b>Sangat Kurang</b> Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

### 2.2.2. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Daerah merujuk pada segala penerimaan kas yang secara sah menjadi hak daerah dan dianggap sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran, serta tidak diwajibkan dikembalikan kepada pemerintah. Salah satu bentuk pendapatan daerah yang relevan dalam konteks otonomi daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada masa otonomi daerah, di mana sistem pemerintahan masih bersifat sentralistik, terlihat bahwa hal ini memberikan dampak yang tidak menguntungkan terhadap pembangunan daerah. Hal ini termanifestasikan dalam pembatasan kebebasan daerah dalam menggali potensi yang dimilikinya, dan dampak merugikan lainnya adalah tingginya tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah (Pemda) terhadap Pemerintah Pusat. Situasi ini disebabkan oleh kontribusi besar dan intervensi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat terhadap pengelolaan pemerintahan di setiap daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang digunakan daerah otonom sebagai sumber untuk menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

### **2.2.3. Kualitas Sumber Daya Manusia**

Sumber Daya Manusia sangat berdampak terhadap kinerja suatu organisasi, sehingga diperlukan SDM yang berkualitas supaya tercipta kinerja organisasi yang efektif dan efisien (Azizah, 2020). SDM yang berkualitas ialah seseorang yang telah dibekali pendidikan yang optimal dan dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam dunia kerja. Mereka mampu bekerja secara bertanggung jawab dan profesional dengan bekal yang telah dimiliki. SDM yang berkualitas akan membentuk pola pikir yang efektif dan efisien.

Penyelenggaraan pemerintah akan berjalan efektif apabila sumber daya manusia dalam suatu wilayah tersebut masing-masing memiliki kontribusi satu sama lain. Kesadaran atas kontribusi tersebut dicerminkan dari sikap profesional antara penyelenggara pemerintah dengan masyarakat di dalamnya (Aryo, 2019). Dari setiap elemen tersebut mempunyai fungsi masing-masing yaitu penyelenggara pemerintah sebagai pelayan masyarakat sedangkan masyarakat sebagai penerima layanan. Kedua hal tersebut harus selalu berjalan beriringan secara stabil, stabilitas tersebut adalah

cerminan dari kualitas sumber daya manusia dalam suatu wilayah tersebut.

Kualitas sumber daya manusia dalam suatu wilayah dapat diukur menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia adalah indikator penting untuk mengukur keberhasilan kualitas hidup masyarakat. IPM dapat menjelaskan bagaimana penduduk memperoleh kehidupan yang layak seperti jumlah pendapatan, kesehatan, dan tingkat pendidikan. IPM tidak dapat mengukur semua dimensi, melainkan indikator komposit tunggal yang dapat mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan kemampuan dasar penduduk (*basic capabilities*) (Setiawan & Hakim, 2013). Ketiga kemampuan dasar itu adalah umur panjang dan sehat, berketerampilan dan berpendidikan, dan standar hidup yang layak. Apabila kemampuan dasar manusia telah terpenuhi maka akan memberikan pengaruh pada kualitas SDM.

### 2.3. Penelitian Terdahulu

No.	Penulis (th) dan Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	(Kadek & Indrawati, 2019) "Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali"	Y: Kinerja Keuangan Pemerintah daerah X <sub>1</sub> : Pendapatan Asli Daerah X <sub>2</sub> : Dana Perimbangan	PAD berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah Sarbagita Provinsi Bali tahun 2012-2016. Dana perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah Sarbagita Provinsi Bali tahun 2012-2016.
2.	Verawaty et al. (2020) "Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan"	Y: Kinerja Keuangan Pemerintah daerah X <sub>1</sub> : Pendapatan Asli Daerah X <sub>2</sub> : Dana Alokasi Umum X <sub>3</sub> : Dana Alokasi Khusus X <sub>4</sub> : Dana Bagi Hasil	terdapat pengaruh positif PAD terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera Selatan tahun 2014-2016. terdapat pengaruh negatif DAU terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera Selatan tahun 2014-2016. terdapat pengaruh negatif DAK

No.	Penulis (th) dan Judul	Variabel	Hasil Penelitian
			terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera Selatan tahun 2014-2016. DBH tidak mempengaruhi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera Selatan tahun 2014- 2016.
3.	Priyono et al. (2020) "Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat di Jawa Tengah"	Y <sub>1</sub> : Kinerja Keuangan Daerah Y <sub>2</sub> : Tingkat Kesejahteraan Masyarakat X <sub>1</sub> : Pendapatan Asli Daerah X <sub>2</sub> : Dana Bagi Hasil X <sub>3</sub> : Dana Alokasi Umum X <sub>4</sub> : Dana Alokasi Khusus	Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah, hanya Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum yang berpengaruh terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat.
4.	Putri & Ratnawati (2023) "Pengaruh PAD,	Y: Kinerja Keuangan Pemerintah daerah	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif

No.	Penulis (th) dan Judul	Variabel	Hasil Penelitian
	Dana Perimbangan, dan SILPA terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”	X <sub>1</sub> : Pendapatan Asli Daerah X <sub>2</sub> : Dana Perimbangan X <sub>3</sub> : Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran X <sub>4</sub> : Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. dana perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah artinya hipotesis ketiga ditolak
5.	Natalia P, Novi (2023) “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”	Y: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah X <sub>1</sub> : Pendapatan Asli Daerah X <sub>2</sub> : Dana Perimbangan	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.
6.	Sari & Halmawati (2021) “Pengaruh	Y: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh

No.	Penulis (th) dan Judul	Variabel	Hasil Penelitian
	Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat”	X <sub>1</sub> : Pendapatan Asli Daerah X <sub>2</sub> : Dana Alokasi Umum X <sub>3</sub> : Belanja Daerah	signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
7.	Putu et al. (2018) “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”	Y: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah X <sub>1</sub> : Pendapatan Asli Daerah X <sub>2</sub> : Belanja Modal	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2011-2015 dan belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2011-2015.
8.	Yuni Pratiwi, Tri (2018) “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan	Y: Kinerja Keuangan Pemerintah daerah X <sub>1</sub> : Pendapatan Asli Daerah	PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah

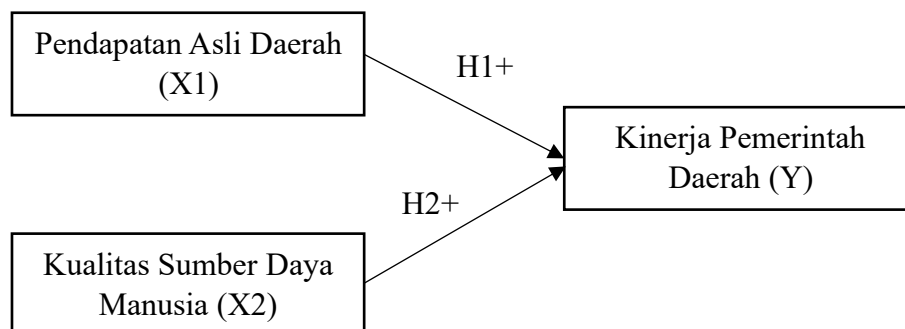
No.	Penulis (th) dan Judul	Variabel	Hasil Penelitian
	Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah)”	X <sub>2</sub> : Dana Perimbangan X <sub>3</sub> : Belanja Modal	daerah, Dana Perimbangan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus secara parsial tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat.
9.	Endah W, Yoshinta (2016) “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja	Y: Kinerja Keuangan Pemerintah daerah X <sub>1</sub> : Pendapatan Asli Daerah X <sub>2</sub> : Dana Perimbangan	Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah, dana perimbangan berpengaruh terhadap

No.	Penulis (th) dan Judul	Variabel	Hasil Penelitian
	Keuangan Pemerintah” (Studi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah)		kinerja keuangan pemerintah.
10.	Dasmal et al., (2020) “Pengaruh Kekayaan Daerah, Belanja Daerah, <i>Intergovernmental Revenue</i> , Temuan Audit terhadap Kinerja Pemerintah Daerah” (Studi pada kabupaten/kota di Riau)	Y: Kinerja Pemerintah Daerah X <sub>1</sub> : Kekayaan Daerah X <sub>2</sub> : Belanja Daerah X <sub>3</sub> : <i>Intergovernmental Revenue</i> X <sub>4</sub> : Temuan Audit (BPK)	Kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah, belanja daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, <i>Intergovernmental Revenue</i> berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah, temuan audit (BPK) tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.
11.	Azizah (2020) “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja”	Y: Akuntabilitas Kinerja X <sub>1</sub> : Kejelasan Sasaran Anggaran X <sub>2</sub> : Kualitas Sumber Daya Manusia X <sub>3</sub> : Sistem Pelaporan	Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan Sistem pelaporan berpengaruh positif

No.	Penulis (th) dan Judul	Variabel	Hasil Penelitian
			terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
12.	Anandah & Aufa (2023) "Pengaruh Perencanaan Anggaran Dan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Efektivitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik"	Y: Efektivitas Kinerja Pemerintah X <sub>1</sub> : Perencanaan Anggaran X <sub>2</sub> : Kualitas Sumber Daya Manusia	Perencanaan anggaran berpengaruh signifikan terhadap efektivitas kinerja pemerintah dan Kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas kinerja pemerintah.
13.	Budiani & Asyik (2021) "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah"	Y: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah X <sub>1</sub> : Kejelasan Sasaran Anggaran X <sub>2</sub> : Pengendalian Akuntansi X <sub>3</sub> : Kualitas Sumber Daya Manusia X <sub>4</sub> : Sistem Pelaporan	Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Pengendalian akuntansi berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Kualitas sumber daya manusia berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan Sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

## 2.4. Kerangka Pemikiran Teoritis

Kerangka konseptual ini digunakan sebagai konsep untuk menjelaskan keterkaitan antara variabel-variabel yang dapat diteliti. Untuk menggambarkan hubungan variabel dengan lebih jelas, skema konseptual dalam penelitian dapat ditunjukkan sebagai berikut:



## 2.5. Pengembangan Hipotesis

**Hipotesis 1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kinerja pemerintah daerah.**

*Stewardship theory* menjelaskan konsep pentingnya sebuah tanggung jawab dan kepercayaan dalam mengelola sumber daya. Pada konsep pemerintah daerah, *stewardship theory* menekankan peran pemerintah bertanggung jawab untuk kepentingan masyarakat.

Teori ini menjelaskan bagaimana pemerintah memanfaatkan pendapatan asli daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mengelola sumber daya yang efektif dan efisien serta mencapai tujuan jangka panjangnya. Apabila penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi maka akan memaksimalkan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan pemerintah daerah dengan prinsip otonomi sehingga akan

berdampak pada kinerja keuangan pemerintah daerah yang semakin baik (Kadek & Indrawati, 2019).

Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Verawaty (2020) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil ini didukung juga oleh penelitian Dasmal et al. (2020), Putri & Ratnawati (2023) dan Priyono et al. (2020) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

H1: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

**Hipotesis 2 Pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap kinerja pemerintah daerah.**

*Stewardship Theory* menjelaskan bahwa masyarakat atau publik sebagai *principal* memiliki hak untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah supaya mampu memberikan pelayanan yang baik demi kesejahteraan masyarakat. Sedangkan pemerintah daerah sebagai *steward* bertanggung jawab atas mandat yang telah diberikan oleh masyarakat. Dalam melaksanakan urusan pemerintahan tentunya masyarakat dan pemerintah memiliki kontribusi masing-masing, maka dari itu dibutuhkan kualitas sumber daya manusia yang baik diantara keduanya.

Kualitas SDM merupakan kemampuan seseorang yang memiliki pendidikan dan mampu mengimplementasikannya dalam tugas dan dapat bertanggungjawab secara baik. Sumber daya manusia memiliki peran penting untuk meningkatkan produktivitas kerja di pemerintah daerah. Kualitas SDM menjadi prasyarat utama bagi organisasi pemerintah untuk memberikan kontribusi yang maksimal dalam mencapai tujuan organisasi.

Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Azizah (2020) yang menyimpulkan bahwa Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

H2: Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kuantitatif karena data yang digunakan sebagian besar menggunakan data numerik yang menggunakan analisis statistik.

#### **3.2. Populasi dan Sampel**

Populasi merupakan seluruh unit yang digunakan sebagai subjek penelitian. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh Pemerintah Provinsi di Indonesia.

Sampel adalah bagian kecil dari populasi yang diambil untuk dilakukan observasi dalam suatu penelitian. Hasil pengujian dari sampel diharapkan merepresentasikan hasil pengujian yang diamati. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Sampel yang digunakan yaitu seluruh pemerintah daerah provinsi yang mempublikasikan laporan keuangannya dan mempublikasikan nilai SAKIP pada periode 2020 – 2022.

#### **3.3. Definisi Operasional Variabel**

##### **3.3.1. Variabel Terikat (Kinerja Pemerintah Daerah)**

Variabel terikat pada penelitian ini adalah Kinerja Pemerintah Daerah. Kinerja Pemerintah Daerah mencakup hasil atau evaluasi yang dilakukan untuk menilai sejauh mana organisasi pemerintah telah menjalankan kegiatan-kegiatannya sesuai dengan aturan-aturan pelaksanaan keuangan dengan cara yang efisien dan sesuai. Kinerja Pemerintah Daerah diukur menggunakan nilai SAKIP. SAKIP adalah

sistem yang digunakan oleh instansi pemerintah untuk mengelola kinerja mereka secara sistematis. Mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, semua kegiatan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa instansi tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. KemenPAN-RB berperan sebagai pihak eksternal yang menilai kinerja instansi pemerintah daerah. SAKIP diterapkan sebagai upaya untuk mencapai kinerja pemerintah daerah yang lebih efisien dalam penggunaan sumber daya dan lebih efektif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dari predikat SAKIP kemudian diklasifikasikan dengan skala ordinal yang tertuang dalam tabel sebagai berikut.

No	Predikat	Nilai Absolut	Interpretasi	Skala
1.	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan	7
2.	A	>80 – 90	Memuaskan	6
3.	BB	>70 – 80	Sangat Baik	5
4.	B	>60 – 70	Baik	4
5.	CC	>50 – 60	Cukup (memadai)	3
6.	C	>30 – 50	Kurang	2
7.	D	>0 – 30	Sangat Kurang	1

### 3.3.2. Variabel Bebas (Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM))

#### 3.3.2.1. Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan materi yang telah disampaikan sebelumnya, Pendapatan Asli Daerah terdiri atas hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022

tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa perhitungan Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

$\text{Pendapatan Asli Daerah} = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan} + \text{Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah}$
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Variabel ini diukur dengan rasio derajat desentralisasi. Perhitungan rumusnya yaitu:

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

### 3.3.2.2. Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan materi yang telah disampaikan sebelumnya, Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator komposit yang menjelaskan bahwa IPM dapat mengukur tiga dimensi pokok (*basic capabilities*) yaitu angka harapan hidup, tingkat pendidikan, standar hidup yang layak. IPM dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$IPM = \frac{\text{Index } X_1 + \text{Index } X_2 + \text{Index } X_3}{3}$$

Keterangan:

$X_1$  = lama hidup

$X_2$  = Tingkat pendidikan

$X_3$  = Tingkat kehidupan yang layak

## 3.4. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data yang dilakukan melalui dokumentasi. Dimana metode tersebut merupakan metode yang mencatat informasi,

menyalin, mereplikasi, membaca dan mengolah data yang relevan dengan penelitian ini. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu

1. Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah seluruh Provinsi di Indonesia tahun 2020 – 2022, yang bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan ([www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)).
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) seluruh Provinsi di Indonesia tahun 2020 – 2022, yang bersumber dari Badan Pusat Statistik ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)).
3. Nilai SAKIP seluruh Provinsi di Indonesia tahun 2020 – 2022, yang bersumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (<https://ppid.menpan.go.id/>)

### **3.5. Alat Analisis**

Teknik pengolahan dan analisis data pada penelitian ini dilakukan menggunakan aplikasi SPSS versi 27, dengan langkah penelitian sebagai berikut:

1. Melakukan uji statistik deskriptif
2. Melakukan uji kelayakan model
3. Menentukan model regresi logistik ordinal
4. Melakukan uji parsial

#### **3.5.1. Analisis Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif adalah suatu metode statistika yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara memberikan gambaran atau deskripsi yang akurat mengenai data yang telah

terkumpul. Pendekatan ini tidak bertujuan untuk membuat kesimpulan yang berlaku secara umum atau generalisasi. Dalam penelitian ini, teknik deskriptif digunakan untuk menjelaskan nilai rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum, dan simpangan baku dari setiap variabel penelitian.

### 3.5.2. Regresi Logistik

Regresi logistik merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel respon yang bersifat *dichotomus* (skala ordinal/nominal yang memiliki dua kategori) atau *polytomous* (skala ordinal/nominal yang memiliki lebih dari dua kategori). Asumsi-asumsi yang digunakan pada regresi logistik adalah sebagai berikut:

1. Variabel respon dengan variabel prediktor tidak harus berhubungan linear tetapi mengasumsikan log odds dari variabel responnya dengan variabel prediktornya memiliki hubungan yang linear.
2. Variabel respon tidak harus terdistribusi normal (tetapi diasumsikan mempunyai distribusi yang berada dalam keluarga distribusi eksponensial).
3. Variabel respon tidak harus homoskedastis dalam setiap kategori variabel prediktornya.
4. Galatnya tidak diasumsikan berdistribusi normal.
5. Variabel prediktor tidak harus berbentuk data interval.

6. Penambahan atau pengurangan level pada variabel kategorik tidak mengubah nilai odds ratio.
7. Tidak terjadi gejala multikolinearitas.
8. Tidak terdapat *outlier*.
9. Asumsi independensi galat terpenuhi.
10. Variabel bebas yang paling konsisten nilainya.
11. Pengkodean berarti (*meaningful coding*). Kode yang tidak berarti akan sulit menginterpretasikan koefisien-koefisien logistik.

Pada penelitian ini, variabel respon bersifat *polytomous* yang berarti memiliki lebih dari dua kategori. Sehingga penelitian ini menggunakan regresi logistik ordinal.

### 3.5.3. Regresi Logistik Ordinal

Analisis regresi ordinal adalah metode statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel prediktor terhadap variabel respon (Hosmer & Lemeshow, 2000). Variabel respon pada regresi logistik ordinal bersifat polikotomus (data kategorik atau yang memiliki urutan tertentu). Model yang digunakan pada regresi ordinal adalah model logit, dengan model logit kumulatif. Dalam model logit kumulatif terdapat sifat ordinal dari variabel respon  $Y$  yang dituangkan dalam peluang kumulatif.

Model logit kumulatif diperoleh dengan cara membandingkan peluang kumulatif yaitu peluang kurang dari atau sama dengan kategori respon ke- $j$  pada  $p$  variabel prediktor yang di dalam vektor  $x$

dengan peluang lebih besar daripada kategori respon ke- $j$ ,  $P(Y > j | \mathbf{x})$  (Agresti, 2013). Berikut merupakan persamaan umum regresi logistik ordinal.

$$\text{Logit}(P(Y \leq j / P(Y > j))) = \alpha_j + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_p X_p$$

Keterangan:

$Y$	=	Variabel respon ordinal
$j$	=	Kategori ke- $j$ dari variabel respon
$P(Y \leq j)$	=	Probabilitas bahwa variabel respon $Y$ kurang dari atau sama dengan kategori ke- $j$
$P(Y > j)$	=	Probabilitas bahwa variabel respon $Y$ lebih besar dari kategori ke- $j$
$\alpha_j$	=	konstanta intersep untuk kategori ke- $j$
$\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_p$	=	koefisien regresi untuk masing-masing variabel prediktor $X_1, X_2, \dots, X_p$
$X_1, X_2, \dots, X_p$	=	variabel independen yang digunakan untuk memprediksi variabel dependen.

#### 3.5.4. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menentukan apakah terjadi hubungan linear atau korelasi antara variabel prediktor yang signifikan pada model regresi. Untuk menentukan apakah terjadi gejala multikolinearitas, maka perlu dilakukan analisis menggunakan VIF (*Variance Inflation Factor*). Jika VIF (*Variance Inflation Factor*)  $> 10,00$  maka terjadi gejala multikolinearitas. VIF

(*Variance Inflation Factor*) memiliki persamaan  $VIF = \frac{1}{1-R_k^2}$ ,

dimana  $R_k^2$  adalah koefisien determinasi.

### 3.5.5. Uji Kesesuaian Model (*Godness of Fit*)

Uji kesesuaian model digunakan untuk memastikan bahwa model regresi logistik ordinal yang dihasilkan telah sesuai atau tidak terdapat perbedaan antara hasil pengamatan dan kemungkinan hasil prediksi model. Hosmer & Lemeshow (2000) menyatakan bahwa pengujian kesesuaian model dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut:

$H_0$  : Model sesuai (tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil pengamatan dengan kemungkinan hasil prediksi model)

$H_1$  : Model tidak sesuai (terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil pengamatan dengan kemungkinan prediksi model)

Statistik uji:

$$\hat{C} = \sum_{j=1}^J \frac{(o_j - n_j \bar{\pi}_j)^2}{n_j \bar{\pi}_j (1 - \bar{\pi}_j)}$$

keterangan:

$o_j$  : Observasi pada grup ke- $j$  ( $\sum_{j=1}^{c_j} y_j$  dengan  $c_j$  : respon (1,2,3,4))

$\bar{\pi}_j$  : Rata – rata taksiran peluang  $\left( \sum_{j=1}^{c_j} \frac{m_j \bar{\pi}_j}{n'_j} \right)$

$g$  : Jumlah grup (kombinasi kategori dalam model serentak

$n'_j$  : Banyak observasi pada grup ke- $j$

Keputusan : jika  $\hat{C}_{hitung} > X^2_{(db,a)}$  atau  $p\text{-value} < \alpha$  maka  $H_0$  ditolak.

### 3.5.6. Uji Keberartian Model (Uji-G)

Uji G merupakan alat analisis yang digunakan untuk menguji bagaimana pengaruh variabel prediktor terhadap variabel respon secara bersama-sama. Hipotesis yang digunakan:

$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_p = 0$

$H_1: \text{sekurang-kurangnya terdapat satu } \beta_p \neq 0, = 1, 2, \dots, p$

Statistik uji yang digunakan yaitu:

$$G = -2 \ln \left[ \frac{\text{likelihood (Model B)}}{\text{likelihood (Model A)}} \right]$$

Besaran yang diperlukan yaitu menghitung  $-2 \ln \text{Likelihood}$  model A dan  $-2 \ln \text{Likelihood}$  model B.

Kriteria pengujian yaitu mengambil taraf nyata maka  $H_0$  ditolak jika

$G > X^2_{(\alpha,v)}$  dimana  $v$  adalah banyaknya variabel prediktor.

### 3.5.7. Uji Parsial (Uji Wald)

Uji wald yaitu alat analisis yang digunakan untuk menguji signifikansi parameter terhadap variabel respon secara parsial (Hosmer & Lemeshow, 2000). Hipotesis yang digunakan:

$H_0: \beta_j = 0$

$H_0: \beta_j \neq 0$  dengan  $j = 1, 2, \dots, p$

Statistik uji yang digunakan yaitu:

$$Z^2 = \frac{\hat{\beta}_j}{SE(\hat{\beta}_j)} \text{ dimana } SE(\hat{\beta}_j) = \sqrt{\text{var } \hat{\beta}}$$

Keterangan:

$SE(\hat{\beta}_j)$  adalah taksiran standar error parameter.

Statistik uji *Wald* mengikuti distribusi *Chi-Squared* sehingga  $H_0$  ditolak jika  $Z^2 > \chi^2_{(\alpha,1)}$  atau P – value  $< \alpha$  (Hosmer & Lemeshow, 2000).

### 3.5.8. Uji Koefisien Determinasi

Pengujian koefisien determinasi digunakan untuk menjelaskan seberapa besar variabel independen dapat mempengaruhi dan menjelaskan variabel dependen dalam model regresi logistik. Apabila nilai mendekati 1 maka model regresi logistik semakin baik dalam menjelaskan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Lalu apabila nilai mendekati 0 maka model regresi logistik kurang baik dalam menjelaskan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen.

## BAB IV

### ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Penyajian Data

Populasi dari studi ini adalah seluruh provinsi di Indonesia. Setelah penentuan jumlah sampel pada bab sebelumnya, analisis mendapatkan sampel yaitu 34 pemerintah provinsi di Indonesia dengan Tahun Anggaran 2020 – 2022, sehingga diperoleh sampel akhir sebanyak 102 data.

#### 4.2. Analisis Statistik Deskriptif

Dalam analisis deskriptif, variabel studi dijelaskan dengan melihat jumlah data, nilai terendah, nilai tertinggi, rata-rata, dan standar deviasi. Nilai minimum ialah nilai terendah dalam data, nilai maksimum ialah nilai yang tertinggi. Rata-rata digunakan untuk menentukan nilai tengah dari sekumpulan data, simpangan baku digunakan untuk mengetahui seberapa jauh data-data dalam suatu kelompok menyimpang dari rata-rata. Hasil statistik deskriptif menggunakan SPSS pada penelitian ini disampaikan pada tabel berikut

**Tabel 4.1 Hasil Analisis Deskriptif**

Descriptive Statistics					
Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SAKIP (Y)	102	3	7	4.5686	0.82666
PAD (X1)	102	5,70	73,21	38,50	15,60159
IPM (X2)	102	61,22	82,77	72,75	3,85578

Sumber: Data sekunder yang diolah di SPSS, 2024

Mengacu pada tabel 4.4 tersebut, bisa dijabarkan hasil statistik deskriptif sebagai berikut:

1. Kinerja Pemerintah Daerah dengan nilai terendah (*minimum*) adalah Provinsi Maluku pada tahun 2020 dengan predikat SAKIP “CC” atau cukup (memadai), tetapi nilai tertinggi (*maximum*) adalah Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta pada tahun 2020 – 2021 dengan predikat SAKIP “AA” atau sangat memuaskan dan nilai rata-rata (*mean*) untuk Kinerja Pemerintah Daerah sebesar 4,5668.

Rata-rata kinerja pemerintah provinsi di Indonesia termasuk dalam kategori “Baik” yang dibuktikan dengan nilai rata-rata sebesar 4,5668. Hal tersebut dapat diinterpretasikan bahwa AKIP pemerintah daerah telah baik pada sepertiga unit kerja, khususnya pada unit kerja utama, tetapi masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.

Rendahnya Kinerja Pemerintah Daerah di Provinsi Maluku yang merepresentasikan bahwa akuntabilitas kinerja perlu dilakukan perbaikan karena program/kegiatan yang dilaksanakan belum memberikan manfaat dan dampak langsung kepada masyarakat. Sedangkan predikat SAKIP sangat memuaskan yang diperoleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan bahwa *good governance* telah diimplementasikan dengan baik serta menunjukkan komitmen dalam peningkatan pelayanan publik, dan program/kegiatan yang dilaksanakan memberikan manfaat dan dampak langsung kepada masyarakat.

2. Derajat Desentralisasi (DD) dengan nilai terendah (*minimum*) ialah Provinsi Papua Barat pada tahun 2020 dengan nilai derajat desentralisasi 5,7%, nilai tertinggi (*maximum*) ialah provinsi Banten pada tahun 2023 dengan nilai derajat desentralisasi 73,21% dan nilai rata-rata (*mean*) untuk Derajat Desentralisasi ialah sebesar 38,5%.

Rata-rata derajat desentralisasi pemerintah provinsi di Indonesia masih tergolong rendah karena rata-rata hanya menunjukkan angka 38,5% sehingga masih banyak pemerintah daerah yang belum optimal menggali potensi daerah yang dimiliki sehingga masih bergantung dana transfer dari pusat.

Rendahnya derajat desentralisasi pada Provinsi Papua Barat yang ditunjukkan dengan angka 5,7% merepresentasikan bahwa Provinsi Papua Barat tidak maksimal dalam menggali potensi daerah yang dimiliki sehingga masih bergantung dana transfer dari pusat untuk membiayai program/kegiatan di daerahnya. Sedangkan derajat desentralisasi yang tinggi yang diperoleh Provinsi Banten menunjukkan bahwa daerah tersebut dapat menggali potensi daerah secara maksimal sehingga tidak bergantung dana transfer yang diberikan pemerintah pusat sehingga otonomi dapat berjalan secara optimal.

3. Indek Pembangunan Manusia (IPM) dengan nilai terendah (*minimum*) ialah Provinsi Papua pada tahun 2020 dengan nilai IPM sebesar 61,22, nilai tertinggi (*maximum*) ialah DKI Jakarta dengan nilai IPM sebesar 82,77 dan nilai rata-rata (*mean*) IPM sebesar 72,75.

Rata-rata IPM di Indonesia menunjukkan kategori sedang yaitu sebesar 72,75, hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas SDM yang diukur dari tingkat kesehatan, tingkat pendidikan, dan tingkat kehidupan yang layak masih belum tercukupi dengan sempurna.

Rendahnya Indek Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Papua menunjukkan bahwa kualitas Sumber Daya Manusia di wilayah tersebut yang dinilai dari indeks kesehatan, indeks standar hidup, dan indeks pendidikan masih tergolong rendah. Hal tersebut akan berdampak pada aspek ekonomi,

aspek politik, aspek sosial, dan aspek lingkungan yang belum terpenuhi dengan baik sehingga mengakibatkan sumber daya manusia yang tidak berkualitas.

Tingginya IPM di Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa kualitas SDM dinilai dari indeks kesehatan, indeks standar hidup, dan indeks pendidikan di daerah tersebut telah terpenuhi dengan baik. Tingginya indeks pembangunan manusia mengindikasikan sumber daya yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan produktivitas.

### 4.3. Analisis Data

#### 4.3.1. Pengujian Parameter Model Regresi

##### 4.3.1.1. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menentukan apakah terjadi hubungan linear atau korelasi antara variabel prediktor yang signifikan pada model regresi. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

$H_0$  : variabel bebas  $x_1, x_2, x_3$  bersifat multikolinieritas ( $VIF > 10$ )

$H_1$  : variabel bebas  $x_1, x_2, x_3$  tidak bersifat multikolinieritas ( $VIF \leq 10$ ).

Berikut merupakan hasil uji multikolinieritas berdasarkan pengolahan data menggunakan software SPSS 27

**Tabel 4.2 Hasil Uji Multikolinieritas**

Model	t	Sig.	Collinearity Statistics	
			Tolerance	VIF
1 (Constan)	-.653	.515		
Pendapatan Asli Daerah	2.648	.009	.625	1.600
Indeks Pembangunan Manusia	3.001	.003	.625	1.600

Sumber: Data sekunder yang diolah di SPSS, 2024

Berdasarkan hasil pengolahan data, diketahui bahwa VIF (*Variance Inflation Factor*) untuk model Derajat Desentralisasi sebesar 1.6 ( $VIF > 10$ ) dan model Indeks Pembangunan Manusia sebesar 1.6 ( $VIF > 10$ ) maka keputusan yang diambil adalah tolak  $H_0$  dan terima  $H_1$ . Kesimpulannya adalah antar variabel bebas (Derajat Desentralisasi dan Indeks Pembangunan Manusia) tidak terjadi gejala multikolinearitas.

#### 4.3.1.2. Uji Kesesuaian Model (*Goodness of Fit*)

Uji kesesuaian model (*Goodness of Fit*) dilakukan untuk menguji seberapa akurat model regresi logistik ordinal dapat memprediksi variabel respon berdasarkan variabel prediktornya. Berikut merupakan hasil uji kesesuaian model (*Goodness of Fit*) berdasarkan pengolahan data menggunakan software SPSS 27.

**Tabel 4.3 Uji Kesesuaian Model**

<b>Goodness-of-fit</b>			
	Chi-Square	df	Sig.
Pearson	293.953	402	1.000
Deviance	179.622	402	1.000
Link function: Logit.			

Sumber: Data sekunder yang diolah di SPSS, 2024

Berdasarkan hasil pengolahan data, diketahui nilai Chi-Square pada metode Deviance sebesar 179.622 dengan derajat bebas sebesar 402. Kriteria pengujian adalah tolak  $H_0$  jika  $\hat{C}_{hitung} > X^2_{(0,05;402)} = 449,74$  atau tolak  $H_0$  bila nilai signifikansi kurang dari 0,05 ( $\alpha = 0,05$ ). Nilai uji Deviance diperoleh bahwa  $\hat{C}_{hitung}$  sebesar 179.622 dengan signifikansi sebesar 1,00. Keputusan yang diambil adalah terima  $H_0$  karena  $\hat{C}_{hitung} (179.622) < X^2_{(0,05;402)} (449.74)$

dengan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Maka dapat diambil kesimpulan model logit layak digunakan.

#### 4.3.1.3. Uji Keberartian Model (Uji-G)

Statistik uji-G dilakukan untuk menguji bagaimana pengaruh variabel independen apabila dimasukkan dalam model regresi logistik secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Berikut merupakan hasil uji-G berdasarkan pengolahan data menggunakan software SPSS 27.

**Tabel 4.4 Hasil Uji-G**

<b>Model Fitting Information</b>				
Model	-2 Log Likelihood	Chi-Square	df	Sig.
Intercept Only	216.523			
Final	179.622	36.901	2	.000
Link function: Logit.				

Sumber: Data sekunder yang diolah di SPSS, 2024

Berdasarkan hasil pengolahan data, diketahui nilai -2 likelihood model B (tanpa variabel prediktor) sebesar 216,523 dan hasil -2 In likelihood model A (dengan variabel prediktor) sebesar 179,622. Sedangkan nilai statistik G sebesar 36,901. Kriteria pengujian menggunakan nilai  $\alpha = 0,05$  dari tabel chi kuadrat diperoleh  $X^2_{(0,05,2)} = 5,99146$ , karena statistic G (36,901) >  $X^2_{(0,05,2)}$  (5,99) maka keputusan yang diambil adalah tolak  $H_0$  dan terima  $H_1$ . Dapat diambil kesimpulan bahwa sekurang-kurangnya terdapat satu  $\beta_p \neq 0$ , yang berarti bahwa terdapat minimal salah satu variabel prediktor yang mempengaruhi variabel respon. Maka untuk uji selanjutnya dapat dilakukan uji secara parsial.

### 4.3.2. Uji Regresi Logistik Ordinal

Apabila pengujian parameter model regresi logistik telah dilakukan dan hasilnya telah sesuai maka dapat dilakukan uji regresi logistik, dan diperoleh hasil sebagai berikut.

**Tabel 4.5 Hasil Uji Regresi Logistik Ordinal**

Parameter Estimates								
		Estimate	Std. Error	Wald	df	Sig.	95% Confidence Interval	
							Lower Bound	Upper Bound
Threshold	[Y = 3,00]	10.648	4.929	4.666	1	.031	.987	20.309
	[Y = 4,00]	16.871	5.160	10.691	1	.001	6.758	26.985
	[Y = 5,00]	18.678	5.222	12.793	1	.000	8.443	28.914
	[Y = 6,00]	20.678	5.320	15.110	1	.000	10.252	31.104
Location	PAD	.054	.017	9.598	1	.002	.020	.088
	IPM	.196	.073	7.171	1	.007	.053	.340

Link function: Logit.

Sumber: Data sekunder yang diolah di SPSS, 2024

Hasil tersebut berdasarkan rumus logit yang telah diuraikan sebelumnya, dimana nilai  $\alpha$  adalah variabel konstanta dan untuk nilai  $\beta$  merupakan koefisien regresi. Konstanta dapat diamati pada kolom *estimate* dan baris *threshold* dengan nilai masing-masing sebesar 10.648, 16.871, dan 18.678. Sedangkan nilai prediktor dapat diamati pada kolom *estimate* dan baris *location* dengan nilai masing-masing sebesar 0.054 dan 0.196. Berdasarkan hasil uji regresi logistik ordinal, maka diperoleh persamaan regresi logistik sebagai berikut:

$$\text{Logit } (Y_3) = 10.648 + 0.054\text{PAD} + 0.196\text{IPM}$$

$$\text{Logit } (Y_4) = 16.871 + 0.054\text{PAD} + 0.196\text{IPM}$$

$$\text{Logit } (Y_5) = 18.678 + 0.054\text{PAD} + 0.196\text{IPM}$$

$$\text{Logit } (Y_6) = 20.678 + 0.054\text{PAD} + 0.196\text{IPM}$$

Rumus di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Koefisien konstanta 10.648, 16.871, 18.678, dan 20.678 pada masing-masing persamaan mewakili nilai logit ketika semua variabel independen bernilai nol.

- b. Koefisien regresi untuk variabel pendapatan asli daerah ( $X_1$ ) bernilai 0.054, menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu unit pada pendapatan asli daerah akan meningkatkan nilai logit sebesar 0,054 unit. Hal tersebut menunjukkan pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.
- c. Koefisien regresi untuk variabel kualitas sumber daya manusia yang diinterpretasikan menggunakan indeks pembangunan manusia ( $X_2$ ) bernilai 0.196 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu unit pada indeks pembangunan manusia akan meningkatkan nilai logit sebesar 0,196 unit. Hal tersebut menunjukkan kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

#### 4.3.3. Uji Parsial (Uji Wald)

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, uji wald digunakan untuk menguji signifikansi parameter variabel prediktor terhadap variabel respon secara parsial. Berikut merupakan hasil uji Wald berdasarkan pengolahan data menggunakan software SPSS 27.

**Tabel 4.6 Hasil Uji Wald**

		Parameter Estimates					95% Confidence Interval	
		Estimate	Std. Error	Wald	df	Sig.	Lower Bound	Upper Bound
Threshold	[Y = 3,00]	10.648	4.929	4.666	1	.031	.987	20.309
	[Y = 4,00]	16.871	5.160	10.691	1	.001	6.758	26.985
	[Y = 5,00]	18.678	5.222	12.793	1	.000	8.443	28.914
	[Y = 6,00]	20.678	5.320	15.110	1	.000	10.252	31.104
Location	PAD	.054	.017	9.598	1	.002	.020	.088
	IPM	.196	.073	7.171	1	.007	.053	.340

Link function: Logit.

Sumber: Data sekunder yang diolah di SPSS, 2024

Berdasarkan hasil pengolahan data, diketahui nilai signifikansi untuk masing-masing variabel independen. Untuk variabel PAD mempunyai nilai

signifikansi  $p$ -value (0,002)  $< \alpha$  (0,05) dengan  $Z^2$  (9,598)  $> X^2_{(\alpha,1)}$  (3,84) sedangkan variabel IPM mempunyai nilai signifikansi  $p$ -value (0,007)  $< \alpha$  (0,05) dengan  $Z^2$  (7,171)  $> X^2_{(\alpha,1)}$  (3,84). Kedua variabel tersebut mempunyai signifikansi  $< \alpha$  (0,05) atau dengan kata lain tolak  $H_0$  jika  $Z^2 > X^2_{(\alpha,1)}$  (3,84). Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kedua variabel yaitu variabel PAD dan IPM tersebut secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

#### 4.3.4. Koefisien Determinasi Model

Nilai koefisien determinasi pada model regresi logistik direpresentasikan oleh nilai Cox and Snell, Nagelkerke, dan Cox and Snell. Berikut merupakan hasil pengolahan data menggunakan software SPSS 27.

**Tabel 4.7 Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Pseudo R Square	
Cox and Snell	.304
Nagelkerke	.345
McFadden	.170
Link function: Logit.	

Sumber: Data sekunder yang diolah di SPSS, 2024

Berdasarkan tabel di atas, diketahui nilai koefisien determinasi Cox and Snell sebesar 0,304 sedangkan koefisien Mc Fadden sebesar 0,170 dan koefisien determinasi Nagelkerke sebesar 0,345 atau sebesar 34,5%. Koefisien Nagelkerke sebesar 34,5% menunjukkan bahwa variabel independen/prediktor (variabel PAD dan variabel IPM) mempengaruhi kinerja pemerintah daerah secara umum sebesar 34,5% sedangkan 65,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam pengujian model.

#### 4.3.5. Hasil Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil uji statistik yang dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut:

##### 4.3.5.1. Hasil Uji Hipotesis 1. Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja pemerintah daerah

Berdasarkan uji wald diperoleh statistik uji wald sebesar ( $Z^2 = 9,598$ ) serta nilai distribusi chi squared sebesar ( $X^2 = 3,84$ ), dengan nilai signifikansi *p-value* sebesar 0,002 (kurang dari  $\alpha = 0,05$ ). Dari hasil tersebut,  $Z^2$  lebih besar daripada nilai distribusi chi squared, maka pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan hasil uji regresi logistik diperoleh koefisien ( $\beta_1$ ) variabel  $X_1$  bernilai positif dengan nilai 0,054, menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu unit pada pendapatan asli daerah akan meningkatkan nilai logit sebesar 0,054 unit. Selanjutnya, dari kedua uji tersebut diperoleh hasil tolak  $H_0$  dan terima  $H_a$  dengan arah positif, maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa  $H_1$  yang menyatakan pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah diterima.

##### 4.3.5.2. Hasil Uji Hipotesis 2. Pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap kinerja pemerintah daerah

Berdasarkan uji wald diperoleh statistik uji wald sebesar ( $Z^2 = 7,171$ ) serta nilai distribusi chi squared sebesar ( $X^2 = 3,84$ ), dengan nilai

signifikansi *p-value* sebesar 0,007 (kurang dari  $\alpha = 0,05$ ). Dari hasil tersebut,  $Z^2$  lebih besar daripada nilai distribusi chi squared, maka kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan hasil uji regresi logistik diperoleh koefisien ( $\beta_2$ ) variabel  $X_2$  bernilai positif dengan nilai 0,196, menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu unit kualitas sumber daya manusia akan meningkatkan nilai logit sebesar 0,196 unit. Selanjutnya, dari kedua uji tersebut diperoleh hasil tolak  $H_0$  dan terima  $H_a$  dengan arah positif, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa  $H_2$  yang menyatakan kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah diterima.

#### **4.4. Pembahasan**

##### **4.4.1. Hubungan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Seluruh Pemerintah Provinsi di Indonesia**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel PAD berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Dilihat dari *p-value* yang dihasilkan senilai  $0,002 < 0,05$ , diperoleh juga nilai statistik uji wald lebih besar daripada nilai distribusi chi squared, serta nilai koefisien bernilai positif yaitu sebesar 0,054 sehingga dapat disimpulkan  **$H_1$  diterima** yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) ( $X_1$ ) berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah pada Seluruh Provinsi di Indonesia tahun 2020 – 2022. Hal tersebut menginterpretasikan bahwa semakin besar PAD maka kinerja pemerintah daerah juga akan meningkat.

Besarnya PAD akan mempengaruhi postur APBD terutama bagaimana pemerintah akan menentukan alokasi anggaran. PAD yang tinggi memberikan diskresi sehingga pemerintah dapat mengalokasikan anggaran sesuai dengan prioritas terutama untuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, atau kegiatan lainnya dengan tujuan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Semakin besar PAD maka semakin besar pula motivasi pemerintah untuk mencapai kinerja yang lebih baik, karena pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengelola sumber daya secara efektif dan efisien demi kualitas pelayanan kepada masyarakat yang semakin baik. Hal tersebut sejalan dengan *stewardship theory* yang dikemukakan oleh Donaldson & Davis (1991), menyatakan bahwa pentingnya komitmen organisasi yang menekankan peran pemimpin dalam memberikan peran yang jelas dan konsisten dalam melayani misi organisasi.

Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Verawaty (2020), Dasmal et al. (2020), Putri & Ratnawati (2023) dan Priyono et al. (2020) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

#### **4.4.2. Hubungan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Seluruh Pemerintah Provinsi di Indonesia**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel PAD berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Dilihat dari *p-value* yang dihasilkan senilai  $0,007 < 0,05$ , diperoleh juga nilai statistik uji wald lebih besar daripada nilai distribusi chi squared, serta nilai koefisien bernilai positif yaitu sebesar 0,196 sehingga dapat disimpulkan **H<sub>2</sub> diterima** yaitu kualitas

Sumber Daya Manusia (SDM) ( $X_2$ ) berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah pada Seluruh Provinsi di Indonesia tahun 2020 – 2022. Hal tersebut menginterpretasikan bahwa semakin tinggi kualitas SDM maka kinerja pemerintah daerah juga meningkat.

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam suatu wilayah tertentu yang dicerminkan dalam Indeks Pembangunan Manusia menjelaskan bahwa setiap elemen baik penyelenggara pemerintah dan masyarakat masing-masing memiliki sikap profesional untuk saling menciptakan kontribusi sesuai hak dan kewajibannya. Kontribusi yang baik telah menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik sehingga meningkatkan kinerja pemerintah. Pemerintah sebagai *steward* telah membangun kepercayaan kepada masyarakatnya sehingga masyarakat sebagai *principal* dapat menjalankan kewajibannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Konsep tersebut sejalan dengan konsep *stewardship behavior in organization* yang dikemukakan oleh Hernandez (2008), menyatakan bahwa manajer membangun kepercayaan secara interpersonal dengan *principal* supaya *principal* menerima tanggung jawab atas tindakan manajer.

Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian (Azizah, 2020) yang menyimpulkan bahwa Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Penelitian ini digunakan untuk menguji bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah dan kualitas sumber daya manusia terhadap kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Variabel pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah pada Seluruh Provinsi di Indonesia tahun 2020 – 2022. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka kualitas pelayanan kepada masyarakat semakin baik. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi maka akan memaksimalkan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan pemerintah daerah dengan prinsip otonomi sehingga akan berdampak pada kinerja pemerintah daerah yang semakin baik
2. Variabel kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah pada Seluruh Provinsi di Indonesia tahun 2020 – 2022. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin baik kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) maka kinerja pemerintah daerah juga akan semakin baik.

#### **5.2. Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah disampaikan, dapat disarankan kepada seluruh Pemerintah Provinsi di Indonesia untuk dapat menggali potensi pendapatan masing-masing daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat supaya

penyelenggaraan pemerintah dapat mencapai tujuan organisasi serta kinerja pemerintah dapat berjalan efektif dan efisien.

### **5.3. Keterbatasan Penelitian**

Setelah melakukan analisis data, dalam penelitian ini penulis menemukan keterbatasan yaitu penulis memperoleh data nilai SAKIP hanya berupa predikat, bukan berupa nilai yang berbentuk angka karena data berupa angka merupakan data yang dikecualikan berdasarkan Keputusan PPID Kementerian PANRB Nomor 3/IP.00/2024.

### **5.4. Agenda Penelitian Mendatang**

Hasil penelitian ini dengan keterbatasan yang telah ditemukan dalam penelitian dapat dijadikan ide bagi penelitian selanjutnya. Penelitian selanjutnya memerlukan variabel pendamping yang mencerminkan angka sehingga variabel dependen tidak berbentuk kategorikal, sehingga hasil penelitian menghasilkan hasil penelitian yang lebih spesifik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agresti, A. (2013). *Categorical Data Analysis* (3rd ed.). A John Wiley & Sons, Inc., Publication. [https://mybiostats.files.wordpress.com/2015/03/3rd-ed-alan\\_agresti\\_categorical\\_data\\_analysis.pdf](https://mybiostats.files.wordpress.com/2015/03/3rd-ed-alan_agresti_categorical_data_analysis.pdf)
- Anandah, N. A., & Aufa, M. (2023). Pengaruh Perencanaan Anggaran Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik. *Jurnal Akuntansi AKTIVA*, 4(1), 1–7. <https://doi.org/10.24127/akuntansi.v4i1.3608>
- Aryo, W. B. (2019). *Membangun SDM Indonesia Membangun Sinergitas*. KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN. <https://www.kemenkopmk.go.id/membangun-sdm-indonesia-membangun-sinergitas>
- Azizah, A. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 1(1), 1–14.
- Budiani, L. V., & Asyik, N. F. (2021). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Kualitas Sumber Daya Manusia, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(2), 1–20. [www.surabaya.go.id](http://www.surabaya.go.id)
- Dasmar, T., Basri, Y. M., & Indrawati, N. (2020). Pengaruh Kekayaan Daerah, Belanja Daerah,, Intergovernmental Revenue, Temuan Audit (BPK) Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Riau). *Jurnal Al-Iqtishad*, 16(2), 39. <https://doi.org/10.24014/jiq.v16i2.10788>
- Hosmer, D. W., & Lemeshow, S. (2000). *Applied Logistic Regression* (2nd ed.). John Wiley & Sons, Inc. <https://doi.org/10.1002/04717222146>
- Kadek, N., & Indrawati, N. (2019). Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 8(5), 2834–2861.
- Muharsyah, O. (2020). Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Pada Kabupaten Muara Enim). *ABIS: Accounting*

- and Business Information Systems Journal*, 4(2), 1–18.  
<https://doi.org/10.22146/abis.v4i2.59330>
- Padang, N. N. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi (JIMAT)*, 2(2), 163–176.
- Priyono, N., Fatimah, A., & Nurcahya, Y. (2020). Pengaruh Pad Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Jawa Tengah. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 5(2), 212–225. <https://doi.org/10.31002/rep.v5i2.2202>
- Putri, S. P., & Kunci, K. (2023). Pengaruh PAD , Dana Perimbangan , dan SILPA terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 6(2), 2068–2082.
- Putri, S. P., & Ratnawati, D. (2023). Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan SILPA terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jesyra*, 6(2), 2068–2082. <https://doi.org/10.36778/jesyra.v6i2.1230>
- Putu, N., Sukma, G., Bagus, I., & Sedana, P. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 7(2), 1080–1110.
- Sari, B. I., & Halmawati. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(1), 1–11.
- Setiawan, M. B., & Hakim, A. (2013). INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA INDONESIA. *Jurnal Ekonomika*, 9, 18–26.
- Setyobudi, R. F. (2016). Analisis Model Regresi Logistik Ordinal Pengaruh Pelayanan di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam terhadap Kepuasan Mahasiswa FMIPA UNNES. *Skripsi Program Studi Statistika Terapan Dan Komputasi, Jurusan Matematika FMIPA UNNES*, 0–87. <http://lib.unnes.ac.id/25055/>

- Verawaty, V., Jaya, A. K., Puspanita, I., & Nurhidayah, N. (2020). Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. *Mbia*, 19(1), 21–37. <https://doi.org/10.33557/mbia.v19i1.560>
- Wahyuningsih, Y. E. (2016). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah*. 17.

## LAMPIRAN

### 1. Hasil Uji-G

<b>Model Fitting Information</b>				
Model	-2 Log Likelihood	Chi-Square	df	Sig.
Intercept Only	216.523			
Final	179.622	36.901	2	<,001

Link function: Logit.

Sumber: Data sekunder yang diolah di SPSS, 2024

### 2. Hasil Uji Multikolinearitas

<b>Coefficients<sup>a</sup></b>								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-1.009	1.544		-.653	.515		
	DESENTRALISASI	.015	.006	.283	2.648	.009	.625	1.600
	IPM	.069	.023	.321	3.001	.003	.625	1.600

a. Dependent Variable: SAKIP

Sumber: Data sekunder yang diolah di SPSS, 2024

### 3. Hasil Uji Regresi Logistik Ordinal

<b>Parameter Estimates</b>								
		Estimate	Std. Error	Wald	df	Sig.	95% Confidence Interval	
							Lower Bound	Upper Bound
Threshold	[Y = 3,00]	10.648	4.929	4.666	1	.031	.987	20.309
	[Y = 4,00]	16.871	5.160	10.691	1	.001	6.758	26.985
	[Y = 5,00]	18.678	5.222	12.793	1	<,001	8.443	28.914
	[Y = 6,00]	20.678	5.320	15.110	1	<,001	10.252	31.104
Location	X1	.054	.017	9.598	1	.002	.020	.088
	X3	.196	.073	7.171	1	.007	.053	.340

Link function: Logit.

Sumber: Data sekunder yang diolah di SPSS, 2024

### 4. Hasil Uji Goodness of Fit

<b>Goodness-of-Fit</b>			
	Chi-Square	df	Sig.
Pearson	293.953	402	1.000
Deviance	179.622	402	1.000

Link function: Logit.

Sumber: Data sekunder yang diolah di SPSS, 2024

5. Hasil Uji Koefisien Determinasi

<b>Pseudo R-Square</b>	
Cox and Snell	.304
Nagelkerke	.345
McFadden	.170
Link function: Logit.	

Sumber: Data sekunder yang diolah di SPSS, 2024

**Pendapatan Asli Daerah di Seluruh Provinsi di Indonesia  
Tahun Anggaran 2020 – 2022**

No	Provinsi	Pendapatan Asli Daerah (dalam milyar rupiah)		
		2020	2021	2022
1	Nanggroe Aceh Darussalam	2.570,78	2.505,89	2.917,15
2	Sumatera Utara	5.531,24	6.402,71	7.258,02
3	Sumatera Selatan	3.375,10	3.865,46	4.930,95
4	Sumatera Barat	2.255,07	2.551,90	2.851,97
5	Bengkulu	712,35	984,42	1.088,42
6	Riau	3.333,18	4.050,47	4.696,77
7	Kepulauan Riau	1.195,64	1.375,77	1.675,73
8	Jambi	1.535,18	1.843,43	2.163,59
9	Lampung	2.842,29	3.249,67	3.678,30
10	Bangka Belitung	683,43	895,76	1.090,48
11	Kalimantan Barat	2.154,15	2.507,32	3.217,81
12	Kalimantan Timur	5.289,23	6.111,92	8.997,26
13	Kalimantan Selatan	2.940,40	3.564,91	4.558,04
14	Kalimantan Tengah	1.570,14	1.851,58	2.523,60
15	Kalimantan Utara	557,65	677,80	815,66
16	Bali	5.906,54	7.010,37	8.203,14
17	Nusa Tenggara Timur	37.414,75	41.606,31	45.608,40
18	Nusa Tenggara Barat	18.521,88	20.333,68	23.249,62
19	Gorontalo	13.668,28	14.695,47	16.264,62
20	Sulawesi Barat	1.876,71	1.900,92	2.263,43
21	Sulawesi Tengah	17.951,00	18.935,89	21.256,65
22	Sulawesi Utara	3.069,47	3.117,07	3.863,19
23	Sulawesi Tenggara	1.166,57	1.238,03	1.363,74
24	Sulawesi Selatan	1.815,69	1.888,46	2.292,07
25	Maluku Utara	414,86	510,80	510,34
26	Maluku	346,86	408,00	457,41
27	Papua Barat	1.122,67	1.494,25	1.559,71
28	Papua	1.125,32	1.310,53	1.464,72
29	Banten	1.017,14	1.373,79	1.419,67
30	DKI Jakarta	3.890,21	4.469,11	4.865,96
31	Jawa Barat	447,29	552,35	779,23
32	Jawa Tengah	545,75	545,75	637,95
33	DIY	485,37	483,95	620,30
34	Jawa Timur	1.388,51	2.139,69	2.226,75

Sumber: <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>

## Predikat SAKIP di Seluruh Provinsi di Indonesia Tahun 2020 – 2022

No	Provinsi	Predikat SAKIP		
		2020	2021	2022
1	Nanggroe Aceh Darussalam	B	B	B
2	Sumatera Utara	B	B	B
3	Sumatera Selatan	BB	BB	B
4	Sumatera Barat	BB	BB	BB
5	Bengkulu	B	B	B
6	Riau	B	B	B
7	Kepulauan Riau	BB	BB	BB
8	Jambi	B	B	B
9	Lampung	B	B	B
10	Bangka Belitung	BB	BB	BB
11	Kalimantan Barat	B	B	BB
12	Kalimantan Timur	BB	BB	BB
13	Kalimantan Selatan	BB	BB	A
14	Kalimantan Tengah	B	B	B
15	Kalimantan Utara	BB	BB	BB
16	Bali	BB	BB	BB
17	Nusa Tenggara Timur	B	B	B
18	Nusa Tenggara Barat	B	BB	B
19	Gorontalo	B	B	B
20	Sulawesi Barat	B	B	B
21	Sulawesi Tengah	B	B	BB
22	Sulawesi Utara	B	B	B
23	Sulawesi Tenggara	B	B	B
24	Sulawesi Selatan	B	B	B
25	Maluku Utara	B	B	B
26	Maluku	CC	B	B
27	Papua Barat	B	B	B
28	Papua	B	B	B
29	Banten	B	B	B
30	DKI Jakarta	BB	A	A
31	Jawa Barat	A	A	A
32	Jawa Tengah	A	A	A
33	DIY	AA	AA	AA
34	Jawa Timur	A	A	A

Sumber : <https://ppid.menpan.go.id/>